

## The Role of the Volksraad in the Dutch East Indies Period

Diva Nancy Audissa Simarmata<sup>1</sup>, Duana Angel Simanjuntak<sup>2</sup>, Rendi Rianto Simarmata<sup>3</sup>, Rosmaida Sinaga<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: [ramadhaninadia224@gmail.com](mailto:ramadhaninadia224@gmail.com); [ciciadiputri@gmail.com](mailto:ciciadiputri@gmail.com); [irafebriani6451@gmail.com](mailto:irafebriani6451@gmail.com); [sinaga.rosmaida@yahoo.com](mailto:sinaga.rosmaida@yahoo.com)

### ABSTRAK

Artikel ini mengulas peran Volksraad, badan perwakilan rakyat pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Melalui tinjauan sejarah, artikel ini membahas bagaimana Volksraad memengaruhi kebijakan kolonial Belanda dan hubungannya dengan dinamika politik serta aspirasi masyarakat pribumi. Analisis dilakukan terhadap peran Volksraad dalam konteks politik kolonial dan perubahan sosial pada masa tersebut. Dengan memahami peran Volksraad, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang dinamika politik dan sosial di Hindia Belanda. Metode yang digunakan yaitu kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian yang berupa buku dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagaimana lahirnya Volksraad dan perannya dalam pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia.

**Keyword: Volksraad; Kolonial; Hindia Belanda; Politik**

### ABSTRACT

*This article reviews the role of the Volksraad, the people's representative body during the Dutch East Indies government. Through a historical overview, this article discusses how the Volksraad influenced Dutch colonial policy and its relationship with political dynamics and aspirations of indigenous people. Analysis was carried out on the role of the Volksraad in the context of colonial politics and social changes at that time. By understanding the role of the Volksraad, this article aims to provide insight into the political and social dynamics of the Dutch East Indies. The method used is literature with collect research materials in the form of books and relevant scientific articles. The results of the research show how the Volksraad was born and its role in the Dutch East Indies government in Indonesia*

**Keyword: Volksraad; Colonial; Dutch East Indies; Politics**

#### Corresponding Author:

Diva Nancy Audissa Simarmata,  
Universitas Negeri Medan,  
Jl. Willian Iskandar Ps. V Kenangan Baru, Kec.Percut Sei Tuan, Sumatera  
Utara 20221, Indonesia  
Email: [simarmatadivanancy@gmail.com](mailto:simarmatadivanancy@gmail.com)



## 1. INTRODUCTION

Masa panjang penjajahan Belanda telah menciptakan beberapa tahapan signifikan dalam sejarah Indonesia. Salah satu tahap penting adalah munculnya periode pergerakan nasional yang dipimpin oleh intelektual dan kaum terpelajar Indonesia. Pergerakan nasional menjadi elemen tak terpisahkan dalam perjalanan sejarah bangsa ini, yang dimulai dari kebijakan politik etis yang merupakan bagian dari kolonialisme Belanda. Kemunduran dan kebangkrutan VOC (Sartono Kartodirjo, dkk, 2009), yang dimulai sejak awal abad ke-18, disebabkan oleh berbagai faktor termasuk pembukuan yang tidak jujur, pegawai yang tidak kompeten dan korup, hutang besar, serta sistem monopoli dan penindasan dalam pengumpulan hasil tanaman penduduk. Perang antara Belanda dan Inggris untuk dominasi perdagangan juga menyebabkan kerugian besar, yang berkontribusi pada kebangkrutan VOC dengan cepat.

Dengan timbulnya isu ini, kita memasuki babak baru dalam politik kolonial yang dikenal sebagai Politik Etis. Politik Etis, juga dikenal sebagai politik balas budi, berakar pada pertimbangan kemanusiaan dan keuntungan ekonomi. Van Deventer dalam tulisannya "Een Eereschuld" atau "Hutang Kehormatan" menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah berkontribusi dalam pemulihan keuangan Belanda dengan

pengertian penuh, sehingga pantas jika budi baik mereka dihargai (Suhartono, 1994). Fokus Politik Etis pada peningkatan pendidikan bagi orang pribumi Indonesia membawa harapan baru, khususnya bagi kaum terpelajar, yang berdampak pada perkembangan gerakan nasional.

Kehadiran kaum terpelajar juga memperkuat munculnya organisasi-organisasi sosial. Sarikat Priyayi, didirikan pada tahun 1906 oleh Tirta Adhi Soerjo, termasuk di dalamnya Thamrin Mohammad Thabrie dan R.A.A. Volksraad atau Dewan Rakyat, merupakan struktur organisasi yang diinisiasi oleh Pemerintah Belanda sebagai respons terhadap dinamika yang muncul saat Perang Dunia Pertama. Pada suatu kesempatan, BO mengusulkan pembentukan Milisi untuk Hindia-Belanda, yang kemudian berkembang menjadi Volksraad pada tahun 1918 sebagai badan penasehat untuk Pemerintah Belanda.

Pada awal sidang Volksraad tahun 1931-1932, agenda sidang tahun itu telah ditetapkan. Fokus pembahasan pertama adalah pada bidang peradilan. Sementara pada sidang berikutnya, pembahasan bergeser ke anggaran pendidikan. Ketua Volksraad, J.W. Meijer Ranneft, mengundang para anggota Volksraad untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai pendidikan. Diskusi mengenai anggaran pendidikan ini memakan waktu yang cukup lama dan mencetuskan perdebatan yang sengit (Djoko Marihandono, Dr. Yuda B, 1987). Keberadaan Volksraad menimbulkan kontroversi di kalangan gerakan nasional karena Volksraad tidak memiliki kekuasaan legislatif yang sama dengan parlemen dalam sistem demokratis. Meskipun Volksraad hanya berperan sebagai penasehat dan tidak dapat mengubah pemerintahan, beberapa anggotanya tidak dipilih secara demokratis, yang menyebabkan pembatasan hak legislatif. Meskipun demikian, Volksraad memberikan ruang aman bagi pemimpin organisasi untuk menyuarakan aspirasi perjuangan tanpa takut represi, meskipun organisasi pergerakan tetap aktif dalam berbagai bidang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Volksraad memiliki peran yang signifikan dalam politik Hindia Belanda, menciptakan nilai-nilai demokrasi dan memberikan platform politik yang lebih inklusif bagi masyarakat pribumi. Pembentukan Volksraad menjadi titik awal terbentuknya elite birokrasi yang menggabungkan kedua golongan masyarakat, termasuk anggota pribumi. Ini membawa perubahan besar dalam pemahaman politik masyarakat pribumi dan menjadi wahana untuk menyalurkan aspirasi mereka. Volksraad berfungsi sebagai lembaga baru yang memberikan pemahaman yang lebih baik tentang politik Hindia Belanda kepada masyarakat pribumi, dan perkembangannya memberikan pengaruh besar terhadap pandangan politik mereka. Pembelajaran politik di Hindia Belanda, melalui Volksraad, melibatkan isu-isu kebijakan dan kenegaraan, serta berdampak pada kesejahteraan dan kehidupan masyarakat pribumi. Pada masa itu, pemerintahan Hindia Belanda adalah pemerintahan kolonial.

Keberadaan Volksraad dalam pendidikan politik menjadi topik penting karena di Hindia Belanda, pendidikan politik masih terbatas dan tidak diajarkan secara formal di sekolah-sekolah. Volksraad memberikan platform bagi penduduk pribumi untuk menyuarakan aspirasi politik mereka dan mendorong kesadaran politik di kalangan kelas menengah ke bawah. Anggota Volksraad dipilih berdasarkan dukungan suara untuk memperoleh kursi, dengan tujuan mendominasi keputusan dalam sidang Volksraad. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut peran Volksraad dalam pendidikan politik masyarakat pribumi serta eksistensi dan dampaknya, dinyatakan dalam judul "Peran Volksraad pada masa Hindia Belanda".

## 2. RESEARCH METHOD

Artikel menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hampir semua bahan bacaan kepustakaan (buku, artikel atau esei) dikelompokkan sebagai sumber sekunder atau sumber tangan kedua. Pada umumnya, buku-buku bacaan dalam pelbagai bidang merupakan reservoir informasi faktual uraian opini interpretasi (teori) dari penulisnya (Mestika Zed, 2004). Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah; mengumpulkan bahan-bahan penelitian yang berupa buku dan artikel ilmiah yang relevan; membaca bahan kepustakaan; membuat catatan penelitian untuk menarik kesimpulan dari informasi yang didapat dari bahan bacaan; mengolah bahan bacaan yang kemudian disusun dalam bentuk laporan penelitian (Mestika Zed, 2004).

## 3. RESULTS AND DISCUSSION

### A. *Terbentuknya Volksraad di Hindia Belanda*

Dengan dimulainya Perang Dunia Pertama pada Agustus 1914, Kerajaan Belanda menghadapi ancaman perang. Meskipun tidak terlibat langsung dalam pertempuran, Belanda mengalami kesulitan besar karena pertempuran antara Inggris dan Jerman di sepanjang pantai Belanda (M. Ten Bouhuya S. H. B. Tenhneff, 1926). Hal ini mengganggu hubungan luar negeri Belanda, termasuk hubungan dengan Hindia-Belanda, dan menghambat pengiriman hasil produksi dari Hindia-Belanda ke Belanda. Kurangnya persiapan di Hindia-Belanda dalam bidang militer, ekonomi, dan pemerintahan juga menjadi perhatian. Pasukan Belanda dikerahkan untuk pertahanan di dalam negeri, menyebabkan perdebatan tentang pertahanan Hindia-Belanda.

Beberapa menolak rencana milisi bumi putera sementara yang lain menyarankan pembentukan dewan perwakilan rakyat terlebih dahulu dengan mendengar pendapat rakyat. Akhirnya, rancangan undang-undang untuk pembentukan dewan perwakilan rakyat diterima oleh parlemen Belanda, sementara pemimpin di Hindia-Belanda menghadapi masalah hubungan kolonial. Komunikasi sulit antara Belanda dan Hindia-Belanda membuat administrator Belanda harus mengambil keputusan sendiri.

Volksraad awalnya dibentuk sebagai badan tunggal yang memberikan nasihat, tetapi untuk masalah keuangan, Gubernur Jenderal harus mengonsultasikannya (M. C. Ricklefs, 2008). Pada awalnya, Volksraad sering kali dikritik dan mendapat desakan terhadap pemerintah kolonial. Namun, dengan diberlakukannya konstitusi baru untuk Indonesia pada tahun 1925, peran Dewan Hindia berkurang menjadi badan penasihat, sementara Volksraad diberi sedikit wewenang legislatif.

Organisasi pertama yang mengangkat isu ini adalah BO. Langkah awal yang diambil oleh wakil ketua BO, Radjimin Widiopoero, adalah mengumumkan melalui seluruh Jawa tentang rencana rapat mengenai Kesiapsiagaan Hindia di bawah kepemimpinan BO pada tanggal 13 September 1914 di Semarang. Untuk tujuan ini, BO mengirimkan propagandis Deidjodowojo ke Jawa Timur dan Sostrowidjono ke Jawa Barat untuk mempromosikan pentingnya membentuk milisi bumiputera. Rapat ini menarik banyak peserta, baik dari organisasi maupun perorangan. Pada kenyataannya, hanya BO yang merespons masalah Kesiapsiagaan Hindia ini, karena SI belum memiliki pengakuan resmi dari pemerintah Hindia-Belanda, sementara IP sudah tidak aktif lagi karena tiga pemimpinnya telah diasingkan. Oleh karena itu, Perang Dunia Pertama dianggap berhasil mengembalikan kekuatan kepada BO (Abdurrahman Surdjomihardjo, 1970). Rapat umum yang diadakan oleh BO pada tanggal 5 dan 6 Agustus 1915 di Bandung menghasilkan pernyataan kepada Pemerintah Hindia-Belanda. Untuk kemajuan negara ini, penting bahwa keamanan dan ketertiban tidak terganggu sama sekali. Mengingat bahwa memiliki tentara tetap lebih mahal daripada milisi, maka pembentukan milisi bumiputera dianggap penting. Namun, karena ada banyak persyaratan yang muncul, pendapat rakyat harus didengarkan terlebih dahulu melalui pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat. Rapat umum ini sangat berpengaruh, sehingga perhatian masyarakat beralih dari masalah milisi ke masalah Dewan Perwakilan Rakyat (S. Suyoningrat, 1916-1917).

Pada tahun 1915, Bupati Sorang Djadajdiningrat segera menyusun pernyataan atas nama gantenbond (Perkumpulan Bupati), yang menyerukan pembentukan milisi bumiputera dan mendesak pembentukan badan Perwakilan Rakyat yang memiliki kekuasaan untuk memberikan saran kepada pemerintah, melakukan penyelidikan, dan meminta penjelasan kepada pemerintah. Sementara itu, SI lokal di berbagai daerah juga aktif membahas sikap mereka terhadap Kesiapsiagaan Hindia. CSI pada saat itu masih belum mengeluarkan pendapat resminya.

Pada tahun 1916, Pemerintah Hindia-Belanda akhirnya membentuk sebuah panitia yang disebut Commite Indie Weerbaar (Panitia Kesiapsiagaan Hindia), yang terdiri dari berbagai organisasi. BO diwakili oleh N. Ng Dwidjosowojo; SI diwakili oleh Abdoel Moeis; Pringenbond diwakili oleh P.A. Koesomodingrat; pegentenbong diwakili oleh R.T. Danoesoegende; dan Perserikatan Minahasa diwakili oleh F. Lech. Pada rapat panitia Indie Weerbaar tanggal 23 Juli 1916, disepakati bahwa semua kelompok masyarakat harus memberikan pendapat mereka tentang Kesiapsiagaan Hindia ini, dan pentingnya pertahanan di Hindia menghadapi perang dunia harus disampaikan, sehingga diperlukan pembentukan milisi bumiputera (Gelosen, 1916). Tidak lama kemudian, propaganda tentang pentingnya pertahanan Hindia tersebar di Semarang, Surabaya, dan Makassar. Di Semarang, rapat panitia diadakan lagi pada tanggal 21 Agustus 1916, dipimpin oleh D. Van Hinloopen Labbarton. Ini memunculkan berbagai isu di kalangan organisasi di Hindia-Belanda tentang kebutuhan milisi Bumiputera.

Van Westarvald, yang secara kebetulan menghadiri rapat tersebut, lebih menyoroti bahwa biaya pendidikan militer yang besar harus dipertimbangkan, dan ia mengusulkan bahwa pendidikan yang memadai untuk bumiputera adalah lebih penting. Wakil-wakil dari Insluinde yang hadir pada saat itu adalah Topee sebagai ketua Insluinde dan Tesuwen sebagai anggota Insluinde. Pada bulan Agustus 1916, ketua CSI Tjokroaminoto menyetujui pembentukan milisi bumiputera untuk pertahanan Hindia. Sebagai tanggapannya, Oetoesan Hindia pada tanggal 26 Agustus 1916 mengutip ucapan Tjokroaminoto yang mengingatkan pada kongres SI tahun 1915 di Surabaya, bahwa SI akan mengarahkan Hindia menuju kemerdekaan. Abdoel Moeis, sejalan dengan pendapat Tjokroaminoto, menyatakan bahwa gerakan IndieWeerbaar akan memberikan kekuatan kepada Hindia. Hampir semua SI lokal di berbagai daerah hampir secara serentak menyatakan persetujuan mereka terhadap milisi bumiputera, kecuali SI Semarang. Anggota-anggota Muhammadiyah, seperti Haji Pachroedin dan Soeradi, baru kemudian menyatakan pendapat mereka.

Dari rapat Commite Indie Weerbaar tersebut, terjadi perbedaan pendapat mengenai perlunya pembentukan milisi bumiputera, baik di kalangan orang Indonesia maupun Belanda. Namun, pada awal tahun 1917, Commite membentuk delegasi Indie Weerbaar yang akan pergi ke Belanda untuk bertemu dengan Sri Ratu. Delegasi ini dipimpin oleh D. Van Hinloopen Labbarton, dengan perwakilan dari BO, SI, Regentandond, dan seorang perwakilan dari dinas militer Belanda, Kapten Rhemrev. Pada bulan Maret, delegasi tersebut tiba

di Den Haag. (Soardi, 1918). Sebagai hasilnya, masalah pertahanan di Hindia Belanda menjadi topik politik di parlemen Belanda. Partai sayap kiri di parlemen Belanda tidak setuju dengan rencana pembentukan milisi bumiputera di Hindia-Belanda, karena menganggapnya sebagai upaya golongan tertentu yang hanya memperjuangkan kepentingan mereka sendiri (Robet van Neil, 1970), terutama golongan liberal yang belum mengikuti kehendak rakyat. Menanggapi ini, Gubernur Jenderal Idenburg menyatakan bahwa delegasi tidak mengemukakan pandangan sebagai satu kesatuan, tetapi hanya memperjuangkan kepentingan masing-masing golongan. Oleh karena itu, pemerintah Belanda kesulitan memperoleh usulan yang jelas dari delegasi. Akibatnya, usulan mengenai pertahanan di Hindia-Belanda gagal mendapatkan dukungan yang memadai dari anggota parlemen Belanda.

Namun, usulan dari delegasi Indie Weerbaar tidak sepenuhnya gagal karena tujuannya utama bukan tentang milisi. Sebenarnya, tujuan utama dari kalangan pribumi adalah agar dibentuknya sebuah parlemen yang dapat membuat undang-undang. Gubernur Jenderal Idenburg juga telah menulis surat kepada Menteri Jajahan Playto untuk mendesak pembahasan undang-undang pembentukan parlemen di Hindia-Belanda. Akhirnya, Rancangan Undang-Undang tentang Parlemen di Hindia-Belanda disetujui oleh parlemen Belanda pada 16 Desember 1916. Badan baru ini dinamakan Volksraad, yang artinya “Dewan Rakyat”, (Akira Nagazumi, 1986).

Pembentukan Volksraad diatur dalam dokumen resmi bernama Staatsblad van Nederlands Indie No. 114 tahun 1916. Usulan untuk pembentukan badan tersebut diajukan oleh Menteri Tanah Jajahan Pleyte dan disetujui oleh Parlemen Belanda pada tanggal 16 Desember 1916. Kemudian, dengan keputusan Raja pada tanggal 30 Maret 1917, ditetapkan bahwa badan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1917. (W.H. Van Helsdingen, 1928).

Komposisi Volksraad adalah sebagai berikut:

- 1) Dari total 39 anggota Volksraad, 15 anggota berasal dari orang Indonesia asli melalui “wali pemilih” dari “dewan provinsi” (10 orang dipilih oleh “wali pemilih” dan 5 orang oleh gubernur jendral).
- 2) Anggota terbanyak, yaitu 23 orang, mewakili golongan Eropa dan golongan timur asing, dipilih dan diangkat oleh gubernur jendral (9 orang dipilih dan 14 orang diangkat)
- 3) Ketua Volksraad tidak dipilih dari anggota Volksraad sendiri, tetapi diangkat oleh Ratu Belanda. Dalam menjalankan tugasnya, Volksraad lebih fokus memberi nasihat kepada Gubernur Jenderal daripada mewakili keinginan masyarakat, (Efriza Syafuan Rozi, 2010).

Anggota Volksraad yang dipilih dari Indonesia meliputi Abdul Moeis, dr. Abdul Riva, M. Aboekasan At-modirono, R.A.A.A. Djajadiningrat, R.M.T.A. Koesoemojoedo, R. Kenil, R.M.A.A. Koesoemo Oetojo, R. Sastro Widjono, A. L. Wawarontoe, dan dr. N. Ng. Radjiman Wediodipoero. Selain itu, anggota Volksraad yang diangkat dari Indonesia termasuk M. Ng. Dwidjosoewojo, F. Lech, Dr. Tjipto Mangoenkoesoem, T.T. Mohamed Thajeb, dan P.A.A.P. Prangwadono.

Volksraad tidak sepenuhnya merupakan badan legislatif. Badan ini memiliki kewenangan yang terbatas, seperti memberikan saran tentang anggaran dan usulan, namun tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan, (Heather Sutherland, 1983). Pemerintah sering menggunakan Volksraad untuk menjelaskan kebijakan mereka dan memberikan peringatan tentang kegiatan mereka. Meskipun memiliki kelemahan, Volksraad menjadi penting bagi kaum nasionalis karena debat-debat di dalamnya sering diliput oleh media dan mempengaruhi opini publik. Secara tidak langsung, Volksraad juga membantu perkembangan organisasi di Indonesia karena pembentukannya memerlukan pemahaman hukum dan kesiapan politik. Pemerintah Kolonial membentuk Volksraad sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi pemerintahan yang dimulai sejak Politik Etika diterapkan pada tahun 1901. Undang-undang Desentralisasi diberlakukan pada tahun 1903 untuk mendirikan berbagai dewan penasehat di tingkat karisidenan dan kotapraja. Meskipun dewan-dewan tersebut tidak memiliki kekuasaan yang besar, karena keputusan penting masih ditentukan oleh residen dan walikota Belanda, dewan-dewan ini menjadi penting untuk pembentukan Volksraad di masa mendatang.

### **B. Peranan politik Volksraad di Hindia Belanda**

Berdirinya Volksraad menjadi titik tolak perubahan sistem politik kolonial di Hindia Belanda. Dewan Rakyat berperan sebagai perantara antara rakyat dengan penguasa, serta bertugas mengkomunikasikan dan menyerap aspirasi rakyat. Masyarakatnya terdiri dari dua kelas utama: pribumi dan bangsawan. Lembaga perwakilan harus dibagi menjadi dua yaitu Pribumi dan Bangsawan. Mereka masing-masing mempunyai hak veto di semua bidang politik. Prinsip kelembagaannya adalah setiap kekuasaan politik harus dibentuk secara terpisah (trias politica), masing-masing mempunyai kekuasaan untuk mengawasi yang lain.

Sejak berdirinya Volksraad masyarakat pribumi anggota Volksraad memosisikan diri sebagai oposisi dan menjadi partai dominan di Fraksi. Para anggota menyampaikan berbagai ide dan pemikiran yang penting. Mereka resmi tergabung dalam Fraksi Indonesia, namun tidak tampil sebagai satu kesatuan pada awalnya. Terjadi konflik internal antar faksi, khususnya konflik kepentingan kelompok, suku, dan agama. Volksraad

lebih mengutamakan menasihati Gubernur Jenderal dibandingkan kegiatan lainnya, yakni mengutarakan keinginan rakyat. Volksraad tidak mempunyai kekuasaan seperti parlemen biasa, karena tidak mempunyai hak untuk menyelidiki atau menetapkan anggaran negara. Volksraad lambat laun berubah tergantung situasi politik pemerintahan Hindia Belanda. Perubahan penting terjadi ketika pemerintahan dasar kolonial Belanda di Indonesia, RR (Reglement Reglement, 1854), menjadi IS (Indische Staatsregeling). Perubahan ini mempengaruhi komposisi dan misi Volksraad.

Dalam Volksraad, kebebasan politik bupati sangat dibatasi sehingga tidak memenuhi harapan masyarakat pribu. Karena keinginan pribumi, Volksraad tetap menjadi sarana komunikasi aspirasi dan perjuangan politik kaum pribumi. Pada awal berdirinya Volksraad, terdapat beberapa kritik dari Belanda yang ditujukan kepada Priyai. Tulisan ini bertujuan untuk menyoroti hubungan antara pembentukan Volksraad dan kesetaraan berdasarkan gagasan politik etis. Menurut tulisan tersebut, dewan daerah yang akan menampung anggota Volksraad di masa depan dikendalikan oleh pejabat pemerintah. Masalah ini perlu diubah. Sebab jika Volksraad dikuasai pejabat maka Volksraad akan gagal. Namun kenyataannya, perubahan ini tidak pernah terjadi. Pada saat itu, sistem nasional hanyalah alat politik pemerintah kolonial. Melalui pemilu multi-tahap yang rumit, keanggotaan Partai Nasional pada awalnya dianggap tidak melayani kepentingan masyarakat pribumi.

Penduduk pribumi dalam Volksraad adalah kelompok yang apatis, karena mereka sama sekali tidak mendengarkan keinginan penduduk pribumi. Status di luar Volksraad seperti Bupati, Binnenlandsch Bestuur, dan Pangeh Praja menjadi salah satu faktor yang membuat kelompok pribumi lebih toleran. Masyarakat pribumi mempunyai jalan yang berbeda dengan sistem yang diberikan pemerintah. Masyarakat semakin yakin bahwa Batavia tidak akan memberikan kelonggaran berarti terhadap gerakan masyarakat pribumi. Peristiwa yang terjadi meningkatkan polarisasi dan dengan demikian memperkuat tuntutan intervensi politik pemerintah oleh kelompok konservatif dalam Pemerintahan Nasional. Karena terjadi keresahan di masyarakat, pemerintah harus melakukan intervensi politik. Pemberontakan disebabkan oleh gagal panen padi dan memburuknya kondisi pelayaran akibat perang. Secara politis, keberhasilan Revolusi Rusia mempengaruhi semangat masyarakat yang memperjuangkan nasibnya. Gerakan sayap kiri menjadi semakin radikal melawan pemerintah. Di dalam Volksraad, ada upaya untuk menyatukan aliran politik pribumi yang dikatakan berhaluan kiri atau berorientasi nasionalis.

Pada masa Gubernur Jenderal D. Fock, Volksraad merupakan badan penasihat pemerintah Hindia Belanda yang terdiri dari seorang asisten Gubernur Jenderal dan empat orang anggota. Pada tahun 1925, ia menjabat sebagai anggota parlemen bersama gubernur. Setelah itu, Raad van Indie menjadi penasihat gubernur dan mengesahkan undang-undang bersama Volksraad. Pada tahun 1928, keanggotaan Raad Van Indie diperluas hingga mencakup asisten gubernur dan dua anggota, ketiganya harus merupakan penduduk setempat. Pada tahun 1925, peraturan pemerintah memberikan Volksraad tugas dan hak legislatif untuk merancang kebijakan, mengubah atau memveto rancangan undang-undang Gubernur, serta hak untuk mengajukan pertanyaan dan mengajukan petisi.

Kehadiran dan eksistensi Volksraad memunculkan banyak perkumpulan yang mengejar tujuan politik. Perkumpulan ini didirikan bersama dengan Volksraad dan sebagian keanggotaannya terdiri dari campuran penduduk pribumi, Belanda, dan masyarakat asing. Perkumpulan tersebut menginginkan Hindia Belanda menjaga hubungan dengan Belanda. Perkumpulan tersebut antara lain Nederlandsch Indische Vrijzinnige Bond, Christelijk Ethische Partij, Indian Katholike Partij, dan Politiek Economische Bond.

Volksraad punya kekuasaan tapi mereka tidak bisa mengesampingkan hak veto Gubernur Jenderal. Segala aspek proses tetap dikontrol oleh pemerintah kolonial. Berbagai upaya dilakukan oleh anggota Volksraad pribumi untuk mencapai tujuannya. Berbagai usulan telah dilontarkan oleh anggotanya untuk mengubah susunan dan pengangkatan Partai Nasional agar dapat mencapai cita-citanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Petisi Sutardjo Tahun 1935. Segala bentuk ketidakadilan yang dilakukan pemerintah terhadap nasib warga setempat mendorong Soetardjo membuat petisi tersebut. Petisi Soetardjo memuat "permohonan kepada pemerintah Belanda untuk mengadakan musyawarah bersama antara Indonesia dan Belanda dalam perundingan mengenai nasib Indonesia ke depan" dan berkaitan dengan Gerakan Parlemen Indonesia dari Persatuan Politik Indonesia. Petisi Soetardjo meminta pemerintah Belanda untuk membentuk dewan yang beranggotakan penduduk asli dan Belanda yang setara untuk mengerjakan rencana kemerdekaan Indonesia.

Pemerintah kolonial melihat Volksraad sebagai ancaman politik. Posisi kaum Nasionalis membuat kebijakan pro-kolonial semakin berbahaya. Dengan timbulnya ancaman Perang Dunia II, pemerintah mengupayakan ketertiban dalam negeri dengan membatasi gerakan Fraksi Nasional di Volksraad. Upaya pertama pada tahun 1940 adalah memberikan hak kepada College Van Gedelegeerden (Dewan Perutusan) untuk mengubah anggaran pemerintah. Pemaksaan ini rupanya berujung pada rencana pemerintah untuk memperkuat angkatan laut agar tahan terhadap perang. Kaum nasionalis Volksraad menganggap tidak ada gunanya ikut serta dalam perang. Pemerintah melakukan upaya baru untuk membatasi gerakan Volksraad.

Penindasan terhadap pers dan gerakan nasionalis menyebabkan penggerebekan dengan kekerasan di rumah para aktivis. Pada Januari 1941, penggeledahan dilakukan di rumah Hoesni Thamrin. Pencarian dilakukan dan Thamrin ditangkap. Pada hari ketiga penahanan Mohammad, Hoesni Thamrin meninggal dunia. Pernyataan resmi pemerintah mengatakan Thamrin bunuh diri, namun rekan aktivis yakin dia dibunuh di penjara. Tekanan terhadap kaum nasionalis meningkat setelah diterbitkannya rancangan undang-undang tentang wajib militer bagi penduduk asli non-Belanda pada bulan Juni 1941. Pemerintah yakin sudah waktunya bagi masyarakat pribumi untuk berperan dalam melindungi tanah air mereka dari bencana. Kondisi tersebut bukan berperan bela tanah air yang diinginkan kaum nasionalis. Oto Iskandar di Nata, yang dikenal sebagai Jarak Harupat juga membela kepentingan pribumi dalam pidato-pidato yang kuat, namun tidak mampu mengatasi tekanan pemerintah.

Politisi nasionalis terus berjuang di Volksraad hingga tahun 1942. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda mengakhiri masa penjajahannya di Hindia Belanda. Alasan utamanya adalah Perang Pasifik yang dilancarkan Jepang. Perang Pasifik berdampak besar terhadap gerakan kemerdekaan negara Asia Timur, termasuk Hindia Belanda. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda adalah untuk mendukung kekuatan militer Jepang dan menguasai sumber daya alam khususnya minyak bumi guna menunjang industrinya. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Kekuasaan kolonial berpindah dari Belanda ke Jepang, dan sistem negara kolonial Hindia Belanda dihapuskan. Keberadaan Volksraad tidak serta merta diakui oleh pemerintah. Dari tahun 1927 hingga 1942, Volksraad hanya mengesahkan enam undang-undang. Dari enam undang-undang yang disahkan Volksraad hanya tiga yang diterima oleh pemerintah kolonial Belanda. Volksraad menyelesaikan misinya dengan berhasil menyusun Undang Undang Dasar untuk mencapai kemerdekaan Indonesia yang menghendaki republik kesatuan. Volksraad digantikan oleh organisasi baru yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia memasuki era perjuangan kemerdekaan.

### **C. Pengaruh Volksraad dalam perkembangan pendidikan politik masyarakat pribumi di Hindia Belanda**

Rakyat pribumi menyadari bahwa kekuasaan politik diperlukan untuk menekan pemerintah Kolonial Hindia Belanda agar memperhatikan kesejahteraan rakyat. Lembaga Volksraad menyatukan semua orang pribumi dari berbagai wilayah kepulauan. Dampak lembaga tersebut membuat pribumi lebih sadar akan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kolonial. Volksraad memberikan sedikit fasilitas kepada kaum nasionalis pribumi yang menjadi anggotanya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat umum dan memperkenalkan gerakan kebangsaan. Dewan memungkinkan pengamatan langsung terhadap keluhan kaum nasionalis. Namun, sebagian besar pemimpin penting gerakan nasionalis menolak untuk berpartisipasi dalam Volksraad selama hampir seluruh masa jabatannya. Keanggotaan Volksraad mencerminkan pandangan minoritas dalam gerakan kebangsaan secara umum. Banyak anggota pribumi dalam Volksraad memiliki tujuan untuk mencapai otonomi pemerintahan sendiri, yang mereka usahakan melalui kerjasama dengan pemerintah Belanda secara bertahap. Volksraad tidak didesain untuk memfasilitasi hubungan antara para pemimpin nasionalis dan massa, dan proses pemilihan anggotanya yang tidak langsung dianggap efektif dalam menghalangi kemungkinan tersebut (Kahin, 1995).

Selain berfungsi sebagai saluran aspirasi masyarakat Hindia Belanda, Volksraad juga berperan sebagai alat untuk memberikan pendidikan politik. Kehadiran pendidikan politik ini dipengaruhi oleh situasi politik di Hindia Belanda, di mana tidak ada pembelajaran politik yang diajarkan di sekolah-sekolah formal yang diselenggarakan oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Volksraad memiliki beberapa peran penting dalam perkembangan politik di Hindia Belanda, terutama di kalangan masyarakat pribumi. Meskipun tidak secara langsung, lembaga Volksraad ikut berkontribusi dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat pribumi. Pendidikan politik di sini merujuk pada proses memengaruhi individu agar mereka memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan politik yang memungkinkan mereka untuk berpikir kritis, bertindak secara terarah, dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan politik mereka.

Pada awal abad ke-19, pemerintah Kolonial mulai menyadari pentingnya pendidikan, yang tercermin dalam penerbitan suatu peraturan. Prinsip yang dipegang teguh tercatat dalam Statuta tahun 1818, yang menyatakan bahwa sekolah-sekolah harus didirikan di setiap tempat sesuai kebutuhan penduduk Belanda dan dengan izin dari keadaan tertentu, terutama jika jumlah murid mencapai 20 di Jawa atau 15 di luar Jawa. Pendidikan yang diterapkan setelah politik etis adalah sekolah-sekolah yang mengajarkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan bahasa. Namun, jenjang pendidikan pada masa Kolonial masih terbatas dan lebih mengutamakan orang-orang yang memiliki kedudukan. Pendidikan pada masa kolonial lebih berfokus pada persiapan untuk jabatan dan pekerjaan, dengan penghasilan menjadi faktor penentu dalam akses terhadap pendidikan.

Pembukaan akses pendidikan bagi warga Belanda dan pribumi di Hindia Belanda bertujuan utamanya untuk mempertahankan kedaulatan pemerintah Belanda di wilayah tersebut. Inti dari pembukaan fasilitas pendidikan di Hindia Belanda adalah untuk menyediakan tenaga kerja rendah bagi pemerintah kolonial. Meskipun pembukaan akses pendidikan bertujuan mencetak pegawai pemerintahan, hal ini bertentangan

dengan tujuan pemerintah. Meskipun tujuan awal tercapai, hasil dari pendidikan tersebut menciptakan kelas sosial baru. Kelompok intelektual menambah komposisi kelas sosial yang sebelumnya terdiri dari orang Eropa, orang Timur (Arab dan Cina), Priyayi, dan Bumiputera. Kaum intelektual menjadi kelas sosial baru dengan pandangan liberal yang berusaha mengatasi dominasi antar kelas sosial.

Kaum intelektual mulai menyadari bahwa praktek kolonialisme dan Imperialisme Kolonial merugikan bangsa. Sebagai individu yang terdidik, mereka mengambil langkah yang lebih lanjut daripada sebelumnya dalam menanggapi ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah Kolonial. Perjuangan kaum intelektual berbeda dari pertempuran seperti yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro atau Imam Bonjol; mereka memiliki semangat dan karakter perjuangan yang lebih luas dan fundamental. Melalui para intelektual, informasi dari seluruh dunia masuk ke Hindia Belanda. Mereka memperhatikan kebangkitan yang terjadi di Jepang melawan Rusia, gerakan Turki Muda, Revolusi Cina, serta gerakan nasional di Filipina dan India. Pendidikan memainkan peran penting dalam penyebaran pengetahuan politik dan ilmiah di Hindia Belanda.

Perjuangan politik menjadi alat paling utama untuk melawan Kolonial seiring dengan penyadaran politik dan memupuk rasa kebersamaan kepada rakyat Hindia Belanda. Para wakil organisasi bumiputera ada yang masuk dalam Volksraad pemerintah Kolonial. Sesuai dengan fungsinya Volksraad merupakan saluran resmi bagi keinginan-keinginan politik bumiputera dalam membangun Hindia Belanda. (Sartono Kartodirdjo, 1999).

Pada awal abad ke-20, munculnya organisasi sebagai alat propaganda perjuangan disebabkan oleh kurangnya akses pendidikan bagi rakyat. Kaum intelektual mulai membentuk organisasi yang tidak resmi tetapi memiliki tujuan yang lebih nasionalis sebagai respons terhadap situasi ini. Organisasi-organisasi ini dibentuk secara hierarkis berdasarkan pada nilai-nilai sosial yang baru. Boedi Oetomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij merupakan organisasi-organisasi yang menonjol dalam perjuangan kaum intelektual bumiputera dan Indo-Belanda. Tindakan yang diambil oleh golongan intelektual adalah bagian dari proses pendidikan politik, di mana gerakan kesadaran terhadap penindasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Kolonial mulai berkembang di kalangan kaum terpelajar bumiputera. Kaum intelektual menjadi pelopor dalam pendirian organisasi-organisasi politik. Meskipun demikian, peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah Kolonial melarang organisasi-organisasi ini terlibat dalam politik. Hal ini menyebabkan kesadaran rakyat pribumi bahwa perjuangan menuju kemerdekaan semakin bergeser ke arah politik.

Pendidikan politik bagi masyarakat pribumi adalah proses kesadaran terhadap kondisi politik di Hindia Belanda. Proses ini berlangsung secara informal dan fleksibel. Perkembangan politik yang terjadi menciptakan pendidikan politik khususnya bagi masyarakat pribumi yang memiliki pemahaman minim tentang politik. Hambatan terhadap partisipasi politik pada masa Kolonial berasal dari dua tingkat kebijakan. Pertama, adalah ketidakakuanan pengakuan terhadap hak politik bagi kaum Bumiputera. Kedua, adalah pengawasan yang ketat terhadap kegiatan masyarakat, terutama untuk menghindari partisipasi politik. Kartini Kartono menyatakan bahwa pendidikan dilihat sebagai faktor politik dan kekuatan politik. Pendidikan dan sekolah pada dasarnya merupakan cerminan dari kekuatan sosial-politik yang berkuasa, serta merupakan refleksi dari struktur penguasa yang ada.

Situasi politik, baik dalam prinsip maupun teknisnya, membuat partisipasi politik sangat terbatas. Hal ini dimulai dari sistem ekonomi yang bersifat dualistik, yang menyebabkan ketergantungan masyarakat pribumi pada ekonomi yang dikuasai oleh golongan Eropa dan Timur Asing. Dualisme politik juga memungkinkan masyarakat pribumi tergantung pada penguasa tradisional dalam ranah politik, sehingga mereka tidak terlibat secara langsung dalam proses politik negara Kolonial. Proses politik Kolonial menjadi penghalang besar bagi pengembangan pendidikan dan partisipasi politik masyarakat pribumi.

Pembentukan Volksraad menandai sebuah kemajuan politik yang unik di Hindia Belanda. Volksraad menjadi langkah awal dalam partisipasi politik resmi bagi pribumi, yang sebelumnya tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik resmi. Untuk pertama kalinya, masyarakat pribumi diikutsertakan dalam badan politik resmi pemerintah Kolonial, bekerja bersama dengan orang-orang Belanda dalam posisi yang sama. Volksraad dapat dianggap sebagai sebuah lembaga partisipasi politik melalui representasi. Kesetaraan dalam kedudukan dan hak berbicara dengan orang-orang Belanda menciptakan pola politik baru di Hindia Belanda. Melalui keterlibatan dalam Volksraad, pribumi mendapatkan pendidikan politik yang komprehensif. Fungsi lembaga ini secara tidak langsung memperkenalkan pola demokrasi yang sebelumnya belum pernah ada di Hindia Belanda. Demokrasi memungkinkan pribumi untuk berpartisipasi secara langsung atau melalui perwakilan dalam pembuatan keputusan, pengembangan hukum, dan proses perumusan kebijakan. Konsep demokrasi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan praktik kebebasan politik yang sama dan adil. Meskipun hak-hak demokrasi masih dibatasi oleh pemerintah Kolonial, keberadaan Volksraad menjadi landasan pendidikan politik bagi pribumi karena mencapai tujuan politis yang penting. Volksraad bertanggung jawab kepada pemerintah Kolonial dan masyarakat pribumi, harus bekerja secara transparan, dan dapat diminta pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan setiap saat.

Meskipun masih terbatas, sistem politik dalam pemilihan anggota Volksraad mencerminkan sebuah proses demokrasi. Pada awal pembentukan keanggotaan Volksraad, sebagian besar anggota dipilih oleh Gubernur Jenderal. Akibatnya, anggota pribumi menjadi minoritas. Masyarakat pribumi menginginkan perluasan hak pilih dan hak politik mereka. Pemerintah Kolonial hanya memenuhi permintaan tersebut ketika situasi memaksa mereka untuk melakukannya. Sikap konservatif pemerintah Kolonial menghambat perkembangan dan pendidikan politik masyarakat pribumi.

Volksraad memiliki perbedaan yang signifikan dengan Parlemen legislatif. Fungsi utama Volksraad adalah memberikan nasihat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Wewenang yang dimiliki Volksraad digunakan oleh anggota pribumi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Anggota pribumi Volksraad menggunakan berbagai cara untuk membela kepentingan rakyat, sering kali dengan reaksi keras. Suara mereka bisa disampaikan melalui surat kabar dalam bahasa Bumiputera, Belanda, dan Tionghoa. Pemerintah merespons tulisan-tulisan yang kritis dalam surat kabar dengan bantahan, bertujuan untuk menjaga reputasi para pejabat Kolonial dan mengurangi pemikiran negatif dari rakyat Belanda terhadap pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Pemerintah Kolonial juga menerapkan kebijakan politik terhadap tokoh-tokoh dalam Volksraad yang dianggap mengancam kestabilan, termasuk pembatasan hak berbicara dalam sidang Volksraad. Hak pilih rakyat masih terbatas sesuai dengan aturan pemilihan dalam Volksraad. Dampaknya adalah tokoh-tokoh yang dianggap berbahaya bisa dikecualikan dari keanggotaan Volksraad pada periode pemilihan berikutnya (Azizah Etek, 2008).

Volksraad merupakan sebuah parlemen yang masih memiliki kendali dari pemerintah Kolonial Hindia Belanda terhadap gerakannya. Kritik yang dibuat di Volksraad bersifat teoritis dan cenderung hanya menangani masalah umum, tanpa menyelami dengan mendalam persoalan yang dihadapi oleh rakyat di Hindia Belanda.

#### 4. CONCLUSION

Volksraad merupakan sebuah lembaga penting dalam sejarah politik Hindia Belanda yang memberikan wadah bagi masyarakat pribumi untuk menyuarakan aspirasi politik mereka. Meskipun Volksraad tidak memiliki kekuasaan legislatif yang sebanding dengan parlemen dalam sistem demokratis, keberadaannya menciptakan nilai-nilai demokrasi dan memberikan kesempatan bagi masyarakat pribumi untuk terlibat dalam proses politik. Pembentukan Volksraad juga merupakan awal dari terbentuknya elite birokrasi yang mencakup kedua golongan masyarakat, baik Belanda maupun pribumi. Volksraad menjadi platform penting dalam pendidikan politik di Hindia Belanda, karena di masa itu pendidikan politik masih terbatas dan tidak diajarkan secara formal di sekolah-sekolah. Melalui Volksraad, masyarakat pribumi dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang politik dan kesadaran berpolitik, serta memperoleh pengalaman dalam proses politik. Meskipun demikian, Volksraad juga memiliki keterbatasan dalam hal representasi dan kekuasaan, dengan anggotanya tidak selalu dipilih secara demokratis dan tidak memiliki wewenang yang cukup untuk mengubah pemerintahan. Namun, peran Volksraad dalam memberikan ruang bagi aspirasi politik masyarakat pribumi serta dalam pendidikan politik memberikan kontribusi penting dalam perkembangan politik dan kesadaran politik di Hindia Belanda pada masa itu.

#### REFERENCES

- Djoko Marihandono, Dr. Yuda B. Tangkilisan, Jaka Perbawa, Sotardjo Hadikoesoemo, (Museum Kebangkitan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), Jakarta: Gramedia, 1987
- Etek, Azizah. 2008. Pidato Otokritik di Volksraad 1927-1938. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta
- Gelosen Hindis, Th. 4, No. 143, 27 Juli 1916.
- Kahin G.M.T. 1995. Nasionalisme Dan Revolusi Di Indonesia. Surakarta: UNS Press
- Kartodirjo Sartono, dkk, "Sejarah Nasional Indonesia Jilid V, Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (tahun 1900-1942)", Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Kartodirdjo Sartono, "Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, jilid 2". (Yogyakarta: Ombak, 2014).
- Kurniawan, D. 2014. Peranan Volksraad Pada Masa Hindia Belanda.
- M. Ten Bouhuya S. H. B. Tenhneff, Onse Tijd: Algemeene En Vederlandsche Gchidanis Van 1770 Tot Heden, (Den Haag: J. S. Wolters 'G. M. Groningen, 1926), 343-344.
- Nagazumi Akira, Indonesia dalam Kajian Sajana Jepang, "Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XXI & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986)
- Pringgodigdo A.K., "SejarahPergerakan Rakyat Indonesia", (Jakarta: Dian Rakyat, 1986).
- Ricklefs M.C., "Sejarah Indonesia Modern 1200-2008". (Jakarta: Oikrar Mandiri Abadi, 2008).
- Rozi Efriza Syafuan, "Parlemen Indonesia. Geliat Volksraad Hingga DPD. Menembus Lorong Waktu Doeloe, Kini Dan Nanti". (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Soardi, "Gerakan Indie Weerbaar", Th. I. No. 25. (30 Desember 1918).

- Suhartono, "Sejarah Pergerakan Nasional dari Boedi Oetomo Sampai Proklamasi 1908-1945", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994
- Surdjomihardjo Abdurrahman, "Budi Utomo dan Kebangunan Nasional", (21 Mei 1970).
- Susanto Zuhdi, dkk. 2019. Dari Volksraad ke Komite Nasional Indonesia Pusat (1917-1949)
- Sutherland Heather, "Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi", (Jakarta: Sinar Harapan, 1983).
- S. Suyoningrat, "Indie Weerbaer". Hindia Poetra, Orgaen van de Indische Vereeniging, (1916-1917), 146-147.
- Van Helsdingen W.H., "Pekerdjaan Dewan Ra'jat Sepoloeh Tahoen 1918-1928", (Jakarta: Balai Poestaka, 1928).
- Van Neil Robet, "The Emergence of The Modern Indonesian Elite", (The Hagus, s. Van Hoeven, 1970).
- Yohannes Sitorus. 2018. Sejarah Terbentuknya Dewan Rakyat Republik Indonesia